



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA

# LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT III

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta

Tahun 2025





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
SURAKARTA**

JALAN KI MANGUNSARKORO NOMOR 141 SURAKARTA 57136  
TELEPON (0271) 723644 FAKSIMILI (0271) 723693

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA  
TAHUN 2025**

**A. Gambaran Umum**

**1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Surakarta sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id) maupun melalui portal website KPKNL Surakarta dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-surakarta>.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID

Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

## 2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Surakarta secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Surakarta dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat.
- b. Layanan melalui surat elektronik (e-mail) [ppid.kpknl-surakarta@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknl-surakarta@kemenkeu.go.id) dan WA layanan pada nomor 0813-1313-3143;
- c. Sarana pengaduan melalui WA pada nomor 0811-262-1414
- d. System Informasi PPID (SI-PPID).
- e. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Surakarta yaitu (0271) 723644.
- f. Serta melalui media social diantaranya *Instagram* (@kpknl-surakarta), *Facebook* (KPKNL Surakarta), dan *YouTube* (KPKNL Surakarta).

## 3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Surakarta dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat III. Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta terdiri dari 6 (enam) pegawai diantaranya Kepala Seksi dan 5 (lima) orang pelaksana yang 4 (tiga) diantaranya sebagai *Persoon in Charge* Informasi Publik.

## 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025, KPKNL Surakarta menerima permintaan informasi publik sebanyak 1 permintaan. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	1
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	8 hari kerja
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	1
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil
5	Kedudukan hukum Pemohon	-
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Bersurat

#### Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

#### Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;	Nihil

#### 5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Tidak Ada kendala dalam pelayanan informasi publik baik internal maupun eksternal di KPKNL Surakarta.

#### 6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholder* di lingkup KPKNL Surakarta, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup KPKNL Surakarta meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini *public* yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan *responsive* terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada seperti layanan online pada kantor *vertical*, media *social* maupun sosialisasi rutin;

- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Surakarta melalui sarana pemberitaan, media social, artikel, dan lain-lain.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III**  
**KPKNL SURAKARTA TAHUN 2025**

No	Nama Kantor	No. Register	Tgl Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	No. Pembentahan Tertulis	Tgl Pembentahan Tertulis	Pembentahan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pembentahan Tertulis (hari kerja)	No. dan Tgl Und.Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	No. dan Tgl Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	No. dan tgl Und. Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	No. dan Tgl Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Ket.		
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik dibenarkan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai												
1.	KPKNL Surakarta	REG-1/PPID.K25 N.09.02/2025	20/6/2025	Dewo Broto Yulianto, SH	Perorangan	Salinan Risalah Lelang Resmi dan informasi SHM No. 05694 NO. 05698 No. 05701 No.05770 penjual Lelang Bank BCA berupa: salinan, berita acara, jumlah peserta lelang, penetapan tanggal lelang.		Bersurat	S-3277/KNL.0902/2025	2 Juli 2025		Nama pemenang lelang, Harga Lelang	Saolinan Risalah Lelang			8 hari kerja											

Surakarta, 2 Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
Surakarta



Ditandatangani secara elektronik

Diana Setiastanti



